

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INDUSTRI
PARIWISATA DI KOTA BANDUNG**

***POLICY OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF TOURISM
INDUSTRY IN BANDUNG***

Sukarno Wibowo, SE. MM
Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung
Jl. Dr. Setiabudi No.186 Bandung
e-mail: karno_wib@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kebijakan pembangunan infrastruktur di Kota Bandung masih fokus pada pengembangan-pengembangan pariwisata pada pusat-pusat kota. Pada sisi ini terjadi sentralisasi pusat-pusat wisata yang tentunya kebijakan ini perlu direformasi dalam rangka optimalisasi pariwisata yang lebih komprehensif. Tujuan pembangunan infrastruktur sebagaimana kajian penelitian ini yaitu untuk melihat sejauhmana pengembangan infrastruktur pariwisata khususnya terkait kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam bidang infrastruktur pariwisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur industri pariwisata di Kota Bandung masih bersifat normatif dan belum optimal terkait pemerataan industri pariwisata. Adapun temuan menunjukkan bahwa kebijakan masih belum menyentuh substansi masalah seperti konektivitas dan daya saing pariwisata. Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terkait kebijakan pembangunan infrastruktur di Kota Bandung.

Kata Kunci: Kebijakan, Industri Pariwisata dan Infrastruktur

ABSTRACT

The problem of this research is the policy of infrastructure development in Bandung, still only focus to tourism development in city center area. On this side, has occurred the centralization of tourist centers, which is this policy needs to be reformed, aims for tourism optimization to be more comprehensive. The purpose of development of facilities and infrastructure of this research is to know how far he progress of the tourism development of infrastructure, especially which related to the policies of the government in Bandung on tourism infrastructure sector. The method which is used on this research is qualitative descriptive. The results of this research shown that the policy of infrastructure development of tourism industry

in Bandung, still normative not yet optimal related to the equalization of the tourism industry. The finding shown that the policy still has not reached to the substance of the problem. Such as the Connectivity and Tourism competitiveness. The recommendation on this research is for local government to evaluate related to the policy of infrastructure development in Bandung.

Keywords: Policy, Tourism Industry and Infrastructure.

PENDAHULUAN

Pariwisata pada perkembangannya terus memiliki peran yang besar dalam pembangunan nasional, adapun hal ini dikarenakan pariwisata dapat menghasilkan pendapatan masyarakat dan pemerintah sekaligus pariwisata juga sebagai penghasil devisa negara. Peranan pariwisata dalam sektor ekonomi tersebut lebih jauh dijelaskan Jovanović dan Ilić (2016:288) yang menjelaskan bahwa “*Tourism is a very complex sector of the economy, whose development affects the progress and prosperity of the national economy*”. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa pariwisata merupakan komponen dari serangkaian inisiatif pembangunan dalam sistem ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh negara dalam membangun sektor ekonomi diberbagai wilayah.

Salah satu wilayah yang terus mengembangkan sektor pariwisatanya adalah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung melalui kebijakan pemerintah kota terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi pariwisata yang tersedia. Salah satu kebijakannya adalah melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Tahun 2012-2025. Kebijakan RIPPARDA merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku di Kota Bandung, selain itu RIPPARDA sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah. Lebih jauh lagi RIPPARDA dijadikan dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah di Kota Bandung.

Kebijakan lain yang dikeluarkan yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Kebijakan ini mendeskripsikan bahwa fungsi kepariwisataan di Kota Bandung yaitu untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan, meningkatkan peran serta pelaku usaha pariwisata dan meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada sisi ini pariwisata sudah dipandang sebagai agenda bersama dalam meningkatkan berbagai komponen positif dalam perkembangan Kota Bandung ke depan.

Dampak yang diharapkan dari kebijakan pariwisata di Kota Bandung pada realitasnya terkait dengan peningkatan dampak dari komponen ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat. Adapun dalam memenuhi komponen tersebut, pariwisata dimanifestasikan dalam aktivitas primer atau sekunder bagi sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah wisata. Namun, ekspresi dampak ini memerlukan investasi di bidang pariwisata, di mana salah satu aspek terpenting adalah investasi di infrastruktur pariwisata. Dengan semakin banyaknya

wisatawan, destinasi tertentu menjadi lebih kompetitif dan lebih menarik bagi investasi dalam pengembangan infrastruktur pariwisata.

Pembangunan infrastruktur di Kota Bandung sebagai kunci utama untuk mengembangkan pariwisata. Infrastruktur di situs-situs pariwisata akan meningkatkan daya saing yang pada akhirnya bakal menekan biaya ekonomi yang tinggi saat ini. Namun perlu ditekankan bahwa dalam pengembangan pariwisata seharusnya tidak hanya pemerintah yang melakukansendiri tetapi pihak-pihak lain juga ikut andil dalam pembangunan infrastrukturpendamping, ini guna meningkatkan pendapatan dari sektor ekonominya.

Charles dan larry (dalam Deddy, 2014:412) menjelaskan tingkat-tingkatperencanaan pariwisata itu dimulai dari pengembangan pariwisata daerah yangmencakup pembangunan fisik objek dan atraksi wisata. Setelah itulah dilakukan, akan dapat melihat bagaimana perkembangan dari jumlah berkunjungwisatawan apabila ternyata mencapai target yang telah ditetapkan selanjutnyaakan memikirkan sistem prioritas. Untuk pengembangan ini perlu dilakukanpendekatan-pendekatan dengan organisasi pariwisata yang ada (pemerintah danswasta) dan pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata daerah tersebut.

Permasalahan terjadi ketika kebijakan pembangunan infrastuktur di Kota Bandung masih tersentralisasi pada program-program pemerintah daerah. Pengembangan ini menyebabkan implementasi kebijakan tidak merata dan tersentralisasi. Pusat-pusat ekonomi pariwisata tergantung pada kebijakan pemerintah yang menyebabkan destinasi wisata tidak berkembang dan mengandalkan pariwisata yang memang sudah dibangun pada periode lalu. Adapun kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur masih bersifat menunjang bukan kepada inti dari destinasi wisata. Perbaikan tanam dan trotoar sesungguhnya merupakan faktor pendukung pariwisata, idealnya pemerintah daerah Kota Bandung dapat meingkatkan destinasi pariwisata yang dapat menjadi alternatif-alternatif wisata bagi wisatawan.

Tujuan pembangunan infrastruktur sebagaimana kajian penelitian ini yaitu untuk melihat sejauhmana pengembangan infrastuktur pariwisata khususnya terkait kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam bidang infrastuktur pariwisata. Adapun fokus dalam masalah ini dimana kebijakan pembangunan infrastuktur di Kota Bandung masih fokus pada pengembangan-pengembangan pariwisata pada pusat-pusat kota. Pada sisi ini terjadi sentralisasi pusat-pusat wisata yang tentunya kebijakan ini perlu direformasi dalam rangka optimalisasi pariwisata yang lebih komprehensif.

Reformasi kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam pariwisata tentunya urgensi untuk dilakukan, hal ini dikarenakan reformasi kebijakan akan membuat kebijakan-kabijakan pariwisata akan lebih sesuai dengan konsep ataupun realita kebutuhan. World Bank (2010:13) menjelaskan bahwa "*Reforms that are required include regulatory framework assistance, tourism monitoring assistance, public/private dialogue, rapid tourism assessments and crisis response strategies*". Adapun Scott (2011:3) berpendapat bahwa "*Tourism policy is an important area for study because of its practical and theoretical importance*". Dengan demikian, pariwisata sudah semestinya tidak dipandang sebagai alternatif

dalam meningkatkan ekonomi, melainkan dapat menjadi aktor utama dalam menciptakan ekonomi yang mapan.

Colebatch (2002:4) dalam studi tentang kebijakan pariwisata menjelaskan bahwa kebijakan pariwisata adalah “...*part of a group of adjectival policies in the sphere of “public policy” that focuses on the subject matter which could be tourism, environment or education and how public authorities deal with it*”. Konsep kebijakan publik di sini mengacu pada pemerintah sehingga bisa membedakannya dari kebijakan lain seperti kebijakan pemerintah daerah Kota Bandung mengenai ketenagakerjaan, lingkungan dan periklanan. Dikatakan bahwa pariwisata Kota Bandung adalah domain kompleks yang menyentuh berbagai area masalah dari keanekaragaman hayati, hingga kesehatan, inovasi, penerbangan dan pembangunan. Semua domain ini merupakan subjek dari resep kebijakan publik atau pandangan pada tingkat geografis yang berbeda yang berkisar dari tingkat global, kontinental, nasional dan regional sampai lokal.

Hasil dari kajian Hall (2008) mengisolasi setidaknya tiga alasan utama untuk meneliti kebijakan publik termasuk kebijakan pariwisata. Pertama, untuk memahami siklus kebijakan sehubungan dengan pencetakan keputusan kebijakan dan dampaknya; Kedua, menawarkan informasi tentang solusi untuk masalah praktis dan dengan demikian memasukkan informasi ini ke dalam proses kebijakan; dan yang ketiga adalah untuk menghargai dan membongkar kepentingan dan nilai-nilai yang terlibat dalam proses kebijakan dan perencanaan seputar sektor pariwisata. Selama tahun 1990an, di tengah kekhawatiran yang ditangkap oleh konsep "modernisasi politik", ada peningkatan pengakuan terhadap "ruang baru" di mana kebijakan pariwisata berlangsung (Dredge dan Jenkins, 2011: 5). Ruang baru berkisar dari ruang non-tradisional dan terkadang tidak terlalu eksplisit dimana diskusi terbentuk. Ini adalah ruang seperti interaksi antara publik dan sektor swasta, antara tingkat pemerintahan, di dalam lembaga pemerintah dan perundang-undangan di bidang non-pariwisata seperti perencanaan kota (Dredge dan Jenkins, 2011). Dengan demikian terdapat urgensi terhadap penelitian mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur industri pariwisata di Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif didasarkan pada perumusan gejala-gejala, informasi-informasi atau keterangan-keterangan mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur industri pariwisata. Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan suatu realitas mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur industri pariwisata di Kota Bandung. Berdasarkan hal tersebut jenis penelitian yang paling tepat adalah jenis kualitatif dengan metode deskriptif analisis, dimana data dan analisis lebih berbentuk kata-kata. Definisi penelitian kualitatif menurut Cresswell (2004:9) adalah:

“A qualitative study is defined as an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted in natural setting”.

Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa dalam sebuah studi kualitatif yang dilakukan peneliti, dapat diartikan sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial kebijakan pembangunan infrastruktur industri pariwisata dengan berdasar pada pembangunan gambaran holistik kompleks, dibentuk dengan kata-kata dan melaporkan pandangan rinci dari informan yang telah diwawancarai. Pada penelitian jenis kualitatif ini peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cermat mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur industri pariwisata di Kota Bandung. Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan menerapkan konsep-konsep yang telah dikembangkan oleh peneliti. Jadi penelitian kualitatif-deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu tanpa menggunakan hipotesa yang telah dirumuskan secara ketat.

Grand theory yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori yang dikemukakan Friderick (2008:79) mendefinisikan kebijakan sebagai “*a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize or a purpose.*” Pendapat tersebut mendeksripsikan bahwa kebijakan diusulkan melalui tindakan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu memberikan hambatan dan peluang, dan diusulkan untuk memanfaatkan tujuan. Sedangkan metode yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Yin (2013:1) studi kasus yaitu:

“In general, case studies are the preferred strategy when "how" or "why" questions are being posed, when the investigator has little control over events, and when the focus is on a contemporary phenomenon within some real-life context”.

Alasan peneliti dalam penggunaan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena dalam penelitian kualitatif gejala bersifat holistik atau menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga tidak atau menetapkan penelitiannya berdasarkan variabel penelitian, sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitian hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial (kasus) yang ditelitei yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Guna menunjang metode penelitian yang digunakan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti yang diuraikan sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*), studi ini peneliti lakukan melalui pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen, literatur dan bahan-bahan tertulis lainnya sebagai pegangan yang berkaitan dengan tema penelitian.
2. Studi lapangan (*field research*), studi ini peneliti lakukan melalui pengumpulan informasi yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan terhadap objek penelitian dari lokasi penelitian dengan cara observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian dan menganalisa berbagai kondisi sebenarnya yang berhubungan dengan masalah kebijakan pembangunan infrastruktur industri pariwisata. Dalam observasi ini peneliti

menggunakan teknik observasi non-partisipatif, dimana peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap objek penelitian tanpa terlibat atau berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan para subjek yang diamati.

Selanjutnya verifikasi data diperlukan bagi setiap hasil penelitian, dalam penelitian kualitatif standar tersebut dinamakan keabsahan data. Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan tehnik pemeriksaan. Salah satu keabsahan adalah *credibility* (Derajat kepercayaan). Kriteria ini pada dasarnya menggantikan konsep *validitas internal* dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan *inquiry* (penyelidikan) sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian. Kegiatan yang akan dilakukan untuk memeriksa kredibilitas hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Membicarakan dengan orang lain

Sebagai usaha untuk memenuhi derajat kepercayaan dengan membicarakan dengan orang lain yang mempunyai pengetahuan tentang pokok penelitian dan juga tentang penelitian kualitatif. Pembicaraan ini bertujuan untuk memperoleh kritik, pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan menantang tingkat kepercayaan akan keberhasilan penelitian. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka *peer debriefing* yaitu melakukan diskusi dengan beberapa praktisi.

2. *Triangulasi*

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Tehnik *triangulasi* yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dengan kata lain bahwa dengan *triangulasi*, diharapkan dapat *re-check* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori.

3. Mengadakan *members check*

Proses ini dilakukan pada akhir wawancara dengan mengecek ulang secara garis besar berbagai hal yang telah disampaikan oleh informan yang telah diperoleh dan digunakan dalam penulisan laporan penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan. Kegiatan ini dilakukan dengan memadukan beberapa hasil wawancara serta mengamati kesesuaian hasil wawancara dengan dokumen dan fakta di lapangan.

Tahap-tahap tersebut merupakan kegiatan yang harus diperhatikan dalam analisis data kualitatif, dimana kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi dalam analisis model interaktif merupakan siklus interaktif dalam pengertian analisis kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan proses menstranformasikan data ke dalam catatan penelitian. Hal ini dilakukan karena data yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dokumen maupun

pengumpulan benda, barang, foto, begitu banyak dan kompleks, mungkin masih campur aduk, maka peneliti perlu mereduksi data memilih mana yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

2. Penyajian data atau display data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah disusun dari hasil reduksi data. Dari penyajian data ini memungkinkan peneliti untuk dapat menarik kesimpulan atau pengambilan tindakan lebih lanjut.

3. Pengambilan Kesimpulan/Verifikasi

Dengan melihat pada tujuan yang ingin dicapai, temuan apa yang menonjol, dan bermakna. Peneliti dapat dari pertanyaan hipotesis, pola-pola hubungan yang diduga sebelumnya. Kesimpulan yang ditarik untuk laporan final harus diverifikasi dengan berbagai cara untuk memperoleh konsensus atau konfirmabilitas. Dalam analisis model interaktif tampak adanya hubungan interaktif antara ketiga komponen tersebut. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali pada reduksi data dan display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi pariwisata terus mengalami perkembangan besar sejak tahun 1950 karena perbaikan sistem transportasi dan rute (Pedrana, 2013:91). Setelah itu banyak destinasi wisata telah berkembang terutama karena globalisasi, ekonomi lokal didorong untuk membandingkan diri mereka dengan ekonomi lokal lainnya. Hal ini berlaku juga untuk pariwisata dengan jelas terkait dengan pergerakan orang dari tempat ke tempat lain. Memperbaiki sistem transportasi dan kesejahteraan ekonomi, pariwisata telah menjadi kegiatan ekonomi global yang fundamental.

Dewasa ini pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang paling mengglobal. Misalnya, pertemuan antara budaya yang berbeda dan pergerakan orang mengarah pada diseminasi kecenderungan global. Namun, globalisasi tidak membantu dalam penjelasan konvergensi dan divergensi dan desentralisasi keputusan. Dengan glokalisasi dapat mendefinisikan pembentukan globalisasi, namun dengan rasa hormat dari entitas lokal. Biasanya ada perbedaan antara lokal dan global, namun, Robertson (1995) menunjukkan bahwa mereka tidak berbeda, tapi lokal adalah bagian dari global. Ini dapat didefinisikan sebagai perhatian global terhadap konteks lokal. Konsep ini membantu dalam memahami hubungan antara ekonomi lokal dan konteks global.

Pembangunan ekonomi pariwisata lokal telah menjadi isu global, konsep tersebut melibatkan tema yang berbeda dan aktor yang terlibat dan tidak ada definisi yang dapat membantu memahami sintesis apa itu pembangunan ekonomi pariwisata lokal. Adapun menurut Pike, Rodríguez-Pose dan Tomaney (2010) menjelaskan dimana *“For the single territory, it is the challenge of enhancing prosperity and well-being”*. Bagi Negara secara keseluruhan, kesempatan pembangunan dalam skala global dimulai dari yang lokal.

Pembangunan pariwisata lokal di Indonesia tersebut berjalan, Kota Bandung sebagai salah satu destinasi terus mengalami perkembangan pariwisata.

Perkembangan tersebut didorong oleh berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah terkait pariwisata. Salah satu kebijakan yang terus diimplementasikan yaitu terkait infrastruktur industri pariwisata. Adapun sebagaimana Hall (2005a) menjelaskan bahwa beberapa cendekiawan pariwisata tertentu tetap mempertahankan kebutuhan akan koleksi empiris yang koheren yang mengeksplorasi politik pariwisata, dan proses perencanaan dan pembuatan kebijakan pariwisata. Salah satu contohnya adalah kasus Filipina yang menggunakan pendekatan analisis jaringan (Dela Santa, 2013).

Istilah "kebijakan" di sini mengacu pada tindakan umum dan hasil pemerintahan daerah yang dipengaruhi oleh keyakinan ideologis dan filsafat politik dan berpuncak pada pengambilan keputusan. Secara khusus, Hall (2009:51) menyatakan bahwa selain pengaruh partai politik terhadap kebijakan pariwisata, organisasi industri juga merupakan elemen penting dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaannya. Mengakui kebutuhan untuk melibatkan pemerintah dan mendapatkan dukungannya, industri pariwisata telah membentuk asosiasi perdagangan. Clarke (2004: 196) menyoroti bahwa partisipasi UKM dalam organisasi semacam itu menyediakan kendaraan ideal untuk menggambar bersama UKM yang berbeda.

Konsep infrastruktur dalam pengembangan pariwisata bersama UKM telah dilakukan pemerintah Kota Bandung dengan membangun *skywalk* Cihampelas Bandung dengan terinspirasi jembatan bekas rel kereta di New York. Adapun untuk lebih jelasnya konsep dari pembangunan infrastruktur di Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1 Pembangunan Infrastruktur Skywalk Cihampelas

Sumber: www.portal.bandung.go.id, diakses tanggal 1 Juni 2017.

Konsep infrastruktur ini memperlihatkan bahwa UKM dengan pemerintah daerah dapat berjalan dengan bersama-sama dalam pengembangan pariwisata. Walaupun hanya bersifat trotoar, namun kebijakan ini dirasa inovatif dalam pemberdayaan UKM tanpa harus bertentangan dengan kepentingan pemerintah daerah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada disekitaran Cihampelas. Bandingkan dengan daerah-daerah lain yang sering kali terjadi benturan kepentingan dan berujung pada benturan fisik dalam rangka penertiban

PKL dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan).

Pengembangan infrastruktur pariwisata lain terfokus pada wisatawan lokal dimana pemerintah daerah terus membenahi taman-taman yang berada di Kota Bandung khususnya pusat-pusat pemerintahan dan ekonomi seperti pada taman balai kota. Berikut merupakan taman balai kota sebagai hasil kebijakan pembangunan pariwisata lokal di Kota Bandung:



Gambar 1 Pembangunan Infrastruktur Pariwisata di Balai Kota

Sumber: <http://www.pikiran-rakyat.com>, di akses tanggal 1 Juni 2017.

Pengembangan kepariwisataan terkait infrastruktur tentunya memungkinkan berkaitan dengan kelompok kepentingan, Hall dan Jenkins (1995: 49) mendefinisikan "Kelompok kepentingan sebagai asosiasi atau organisasi yang membuat klaim, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pemerintah sehingga mempengaruhi kebijakan publik tanpa dirinya sendiri yang bersedia menjalankan kekuasaan formal pemerintahan". Dalam wacana perumusan kebijakan pariwisata istilah "kelompok kepentingan" sering digunakan secara bergantian dengan istilah "kelompok penekan", "kelompok pelobi", "kelompok kepentingan khusus" atau "kepentingan terorganisir" (Wray, 2009: 674). Secara umum, istilah-istilah ini mengacu pada organisasi yang mengklaim secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik tanpa dirinya sendiri yang bersedia menjalankan kekuasaan formal pemerintah.

Kelompok minat wisata berusaha agar kebijakan pemerintah dikembangkan untuk kepentingan mereka. Mereka beroperasi pada sejumlah skala yang berbeda (internasional, nasional dan lokal) dan diklasifikasikan menurut tingkat pelebagaan mereka. Ini adalah asosiasi di tingkat daerah yang berpotensi memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan di tempat tujuan. Antara lain Hall (2008) dan Scheyvens (2002) berpendapat bahwa negara bangsa sebagai entitas telah melemah akibat meningkatnya liberalisasi ekonomi dan integrasi global. Meskipun demikian, pemerintah masih memiliki peran utama dalam pariwisata melalui perumusan kebijakan dan strategi serta regulasi industri pariwisata. Peran tradisional pemerintah semakin beralih ke sektor swasta dan relawan sehingga sulit untuk mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan

pemerintah meskipun dikatakan bahwa negara masih menentukan keseluruhan tujuan kebijakan nasional (Dredge dan Jenkins, 2007).

Pada realitasnya masih ditemukan beberapa kelompok kepentingan yang belum sepenuhnya menjalankan kebijakan-kebijakan pariwisata, sebagai contoh pedagang yang tidak berjualan pada lokasi seharusnya sampai dengan lemahnya pengawasan terhadap pajak yang berkaitan dengan pariwisata. Khusus terkait pengawasan perpajakan merupakan masalah yang kompleks yang sejauh ini masih belum ditemukan solusi ideal dalam rangka pengawasan. Permasalahan lain ketika masih terdapat destinasi wisata yang tidak terkoneksi dengan destinasi wisata lainnya. Belum adanya kebijakan terkait konektivitas berimplikasi pada penguatan ego sektoral terhadap destinasi-destinasi wisata di Kota Bandung,

Sebagai sebuah proses, kebijakan melampaui pemerintah untuk memasukkan pemangku kepentingan lainnya seperti industri pariwisata sektor swasta, asosiasi wisatawan dan bahkan kelompok penekan. Memang, semakin banyak kebijakan dilihat sebagai proses sosial dan semakin dipengaruhi oleh konteks kelembagaan dan oleh para pembela isu yang disebut sebagai aktor, agen dan jaringan (Dredge dan Jenkins, 2007). Asumsinya yang mendasar adalah bahwa kebijakan publik, dan memang kebijakan pariwisata, melibatkan proses yang secara inheren iteratif, reflektif, multi dimensi dan multi-faceted yang terjadi di lingkungan yang dinamis. Isu ini sangat penting dalam konteks global dan terutama di jalur penting pengembangan pariwisata memiliki implikasi mendasar bagi kelompok masyarakat dan ekonomi mana yang muncul sebagai penerima manfaat pengembangan pariwisata.

Kebijakan pariwisata perlu dipahami juga dalam kaitannya dengan kebijakan ekonomi yang lebih luas. Kerr (2003: 31) menunjukkan bahwa pariwisata dapat berada di bawah kebijakan ekonomi yang lebih luas. Telfer dan Sharpley (2008: 113) sepakat bahwa kebijakan pariwisata tidak dapat dikembangkan secara terpisah namun perlu diintegrasikan sebagai bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas. Dengan kata lain, berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi dan inisiatif peraturan lainnya secara tidak langsung dapat menentukan hasil inisiatif di sektor pariwisata.

Penting juga untuk mengetahui fakta bahwa pemerintah memiliki banyak peran selain pembuatan kebijakan publik seperti koordinasi dan promosi usaha kewirausahaan, promosi pariwisata dan perlindungan kepentingan umum. Namun demikian, berbagai Satun Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan departemen pemerintah yang menangani isu-isu yang berkaitan dengan pariwisata cenderung terfragmentasi dan gagal mengkoordinasikan proses kebijakan di antara mereka sendiri yang memilih untuk mengadopsi mentalitas "silo" terhadap pengembangan kebijakan.

Tosun (2000) mengidentifikasi tiga tantangan utama yang mengkondisikan partisipasi masyarakat dalam pariwisata yang juga dapat diterapkan pada ranah perumusan kebijakan, yaitu, operasional, batasan struktural dan budaya. Batasan operasional terjadi dalam bentuk kurangnya atau kurangnya komunikasi dan berbagi informasi serta koordinasi yang tidak memadai antara tingkat kebijakan dan aktor yang berbeda. Batas struktural adalah masalah kekuasaan dan perbedaan

dan hambatan organisasi, sedangkan batasan budaya adalah perbedaan budaya dan pengetahuan antara pemangku kepentingan pariwisata.

Sumbangan lebih lanjut bermanfaat Janis (2011:25) memperkenalkan konsep dua bidang pengetahuan kebijakan, yaitu pengetahuan kebijakan profesional dan pengetahuan kebijakan daerah. Sementara pengetahuan kebijakan profesional dianggap sebagai pengetahuan kebijakan lokal yang teknis, sistematis dan rasional mengacu pada persepsi dan pengalaman perwakilan perusahaan pariwisata mengenai bidang kebijakan pariwisata tertentu. Pengetahuan ini sering tidak ditulis atau tersedia dalam format yang mudah diakses. Pengetahuan semacam itu diperoleh oleh individu atau organisasi yang terlibat dalam perolehan, akuisisi dan transformasi informasi. Ini diakses melalui wawancara dan diskusi informal dan pengamatan. Beberapa praktisi pariwisata dengan pengetahuan kebijakan pada akhirnya mengambil posisi penting dan berperan penting dalam perumusan kebijakan.

Janis (2011: 27) mengemukakan bahwa pengetahuan tersebut melengkapi, mendiversifikasi dan menantang pengetahuan kebijakan konvensional dalam proses kebijakan pariwisata dan pengetahuan ini memiliki nilai teoritis dan praktis bagi peneliti akademis, praktisi kebijakan publik dan pemangku kebijakan lainnya pada tingkat yang berbeda. Perbedaan antara pengetahuan kebijakan profesional dan pengetahuan kebijakan lokal sangat tepat dalam melakukan analisis kebijakan.

Sepuluh prinsip menggarisbawahi kebijakan pariwisata nasional. Prinsip panduan dapat disimpulkan sebagai penetapan bahwa:

1. Kebijakan Pariwisata akan didorong oleh kepentingan nasional dan bukan oleh kepentingan diri yang sempit;
2. Pariwisata harus kompetitif secara regional dan internasional;
3. Pemerintah mengakui kontribusi sektor swasta terhadap tujuan pemerintah dan akan memfasilitasi pelaksanaannya yang efektif di pasar global;
4. Peningkatan partisipasi dan pemerataan lokal sangat penting untuk menyebarkan manfaat pariwisata;
5. Pengembangan pariwisata harus ekonomis, berkelanjutan secara sosial dan lingkungan;
6. Pemerintah mengakui perannya dalam perlindungan sumber daya alam;
7. Fungsi investasi dan operasional pemerintah di bidang pariwisata Sektor akan berada di bidang pengembangan infrastruktur, pemasaran, pendidikan, dan pengembangan keterampilan;
8. Investasi pariwisata, pengembangan dan promosi harus didorong oleh pasar;
9. Intervensi pemerintah akan didasarkan pada manfaat ekonomi nasional; dan
10. Faktor manusia sangat penting dalam memastikan bahwa standar memenuhi persyaratan pariwisata nasional, regional dan internasional saat ini. (MET, 2008: 2)

Telah dijelaskan bahwa pemerintah akan menciptakan lingkungan yang mendukung dengan menempatkan kondisi kerangka politik, ekonomi, fisik manusia dan fisik yang kondusif bagi pembangunan dan dengan menghilangkan

hambatan. Peraturan juga penting untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi dan lahan dari penggunaan berlebihan, serta memastikan kelestarian lingkungan, keamanan publik dan pemeliharaan standar "(MET, 2008: 4).

SIMPULAN

Analisis mengenai kebijakan tetap menjadi "area kritis" yang memerlukan penelitian lebih lanjut tentang apa permasalahan ataupun konsep model yang ideal terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur pariwisata. Di Kota Bandung analisis pengembangan kebijakan menunjukkan bahwa putusan muncul di antara tujuan untuk meningkatkan partisipasi orang-orang wisatawan lokal untuk berwisata di Kota Bandung. Temuan ini cukup menarik dimana pemerintah daerah masih fokus pada konsep infrastruktur wisata lokal dibanding meningkatkan destinasi wisatawan luar untuk berkunjung ke Kota Bandung. Pembangunan taman-taman Kota Bandung realitasnya telah meningkatkan jumlah wisatawan lokal di Kota Bandung. Namun permasalahan terjadi ketika penembangan infrastruktur masih terfokus pada pusat pemerintahan dan ekonomi Kota Bandung. Hal ini meningkatkan ketimpangan kuantitas wisata di daerah-daerah pinggiran. Jika tidak responsif dalam persoalan ini dapat menimbulkan masalah sosial terkait perhatian pemerintah Kota Bandung pada daerah pinggiran. Berdasarkan hal tersebut perlu langkah-langkah terkait kebijakan dalam pembangunan infrastruktur di Kota Bandung seperti:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pariwisata di Kota Bandung dengan memfokuskan substansi permasalahan
2. Melaksanakan kajian dengan disertai kebijakan dan program terkait konektivitas antar destinasi wisata
3. Membuat program tentang pentingnya memelihara fasilitas publik oleh masyarakat
4. Melakukan pengembangan pariwisata dengan memperhatikan potensi dan pemerataan destinasi di wilayah Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Clarke, J. 2004. Trade Associations: An Appropriate Channel for Developing Sustainable Practice in SMEs? *Journal of Sustainable Tourism*, 12 (3). 194-208.
- Colebatch, H. 2002. *Policy*. Milton Keynes: Open University Press.
- Creswell, John W. 2003, *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*: London: Sage
- Deddy Prasetya Maha Rani. 2014. Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang). *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, 412-421.
- Dela Santa, E., 2013. The Politics of Implementing Philippine Tourism Policy: A Policy Network and Advocacy Coalition Framework Approach. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 18 (8), 913-93.
- Dredge, D., dan Jenkins, J. (Eds.), 2011. *Stories of Practice: Tourism Policy and Planning*. Aldershot: Ashgate
- Friedrick, Carl. 2008. *Man and His Government*. New York: Mc Graw Hill.
- Hall, C M. dan Jenkins, J. 1995. *Tourism and Public Policy*. London: Routledge
- Hall, C. M. 2005. Policy Learning and Policy Failure in Sustainable Tourism Governance: From First- and Secondorder to Third-order Change? *Journal of Sustainable Tourism*, 19 (4-5), 649-671.
- Hall, C. M. 2008. *Tourism Planning, Policies, Processes and Relationships*. Second edition. Harlow: Pearson.
- Hall, C. M. 2009. Tourism Policy and Politics in Southern Africa. In Saarinen, J., Becker, F., Manwa, H., and Wilson, D., (Eds.) *Sustainable tourism in Southern Africa. Local communities and natural resources in transition*, (pp. 42–60). Channel View, Bristol.
- Janis, J. 2011. *The Tourism-Development Nexus in Namibia – A Study on National Tourism Policy and Local Tourism Enterprises' Policy Knowledge*. Helsinki: University of Helsinki.

- Jovanovic, S. and Ilic, I. 2016. Infrastructures as Important Determinant of Tourism. *Development in the Country of Southeast Europe. Ecoforum*, Volume 5, Issue 1(8), 288-289.
- Kerr, W., 2003. *Tourism Public Policy and the Strategic Management of Failure*. Oxford: Pergamon.
- MET (Ministry of Environment and Tourism), 2008. *National Policy on Tourism for Namibia*. Windhoek: Directorate of Tourism.
- Pedrana. 2013. Local Economic Development Policies and Tourism. An Approach To Sustainability and Culture. *Regional Science Inquiry Journal*, Vol. V, (1), 2013, pp. 91-99.
- Pike, A. Rodriguez-Pose, A. e Tomaney, J. 2010. *Local and Regional Development*, London: Routledge.
- Robertson, R. 1995. *Glocalization: time-space and homogeneity-heterogeneity*, in Featherstone, M., Lash, S. and Robertson, R., *Global modernities*, London: SAGE.
- Scheyvens, R. 2002. *Tourism for Development: Empowering Communities*. Herlow: Prentice Hall
- Scott, N. 2011. *Tourism Policy: A Strategic Review*. Oxford: Goodfellow Publishers.
- Telfer, D. & Sharpley, R. 2008. *Tourism and Development in the Developing World*. Routledge: Abingdon.
- Tosun, C. 2000. Limits to Community Participation in Tourism Development Process in Developing Countries. *Tourism Management*, 21, 613- 33.
- World Bank 2010. *Transformation through Tourism, Harnessing Tourism for Growth and Improved livelihoods*. The World Bank, Washington DC.
- Wray, M. 2009. Policy Communities, Networks and Issue Cycles in Tourism Destination Systems. *Journal of Sustainable Tourism*, 17 (6), 673-690.
- Yin, Robert K. 2013. *Studi Kasus: Desain dan Metode*, diterjemahkan oleh Dr. M. Djauzi Mudzakin, MA, cetakan ke-12. Jakarta: Rajawali Pers.

Sumber Online/Internet:

<http://www.portal.bandung.go.id>, di akses tanggal 1 Juni 2017.

<http://www.pikiran-rakyat.com>, di akses tanggal 1 Juni 2017.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Tahun 2012-2025.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.